

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

Bachtiar, Effendi, Kumpulan Tulisan tentang Hukum Tanah. Bandung: Alumni, 2012

Bambang Trisantono Soemantri, Pedoman Penyelenggaraan Pemerintah Desa, Bandung, Fokusmedia, 2010.

Harsono, Boedi, *Hukum Agraria Indonesia*, Sejarah Pembentukan UndangUndang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya. Jakarta : Djambatan, 2008

Hendratno, Otonomi Daerah Di Indonesia. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2009

Idris Zahara, *Dasar-dasar Kependidikan*, Bandung : Angkasa, 1981

Ibrahim, Jhonny, , *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing : Malang, 2006

Jazim Hamidi, *Penerapan Asas-asas Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Layak (AAUPL) di Lingkungan Peradilan Administrasi Indonesia* (Upaya Menuju “Clean and Stable Government”), Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, Kuntjoro Purbopranoto, *Beberapa Catatan Hukum Tata Pemerintahan dan Peradilan Administrasi Negara*, Cetakan IV, Alumni, Bandung, 1985 Lalu Husni, *Hukum Hak Asasi Manusia*, PT. Indeks Kelompok Gramedia, Jakarta, 2009.

Maurer, Jeane-luc, *Pamong Desa or Raja Desa? Wealt.status and power of village officers in Antlov, H.and cedderroth.s(ed) leadership in java: gentle hints, authoritarian rule routledge & curzon pp*, 1994

M. Wagianto, S.H ,M.H *Perlindungan Hukum Bagi Warga Masyarakat Yang Tanahnya Terkena Pembangunan Untuk Kepentingan Umum*, Bandar Lampung. Percetakan Osa,2012

Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2009.

Nurkolis, *Manajemen Berbasis Sekolah*. Jakarta: Grasindo,2005

Ndraha, Taliziduhu, *Dimensi Pemerintahan desa*. Jakarta : Bumi Aksara. 2013.

Nurcholis, Hanif, *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Jakarta: PT. Grasindo, 2011

Peter Mahmud, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta; Kencana Prenada Media Group, 2008

Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Edisi Revisi cetakan VI, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2011.

Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2001

Supriyanto, Budi, *Manajemen Pemerintahan : Plus Dua Belas Langkah Strategis*. Jakarta : CV.Media Brilian, 2009

Sugiono Dendi , *Kamus Bahasa Indonesia Pusat*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada

Soekanto, Soerjono.. *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta : Rajawali Pers . 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : Universitas Indonesia (UI PRESS), 1983

Sitorus, Oloan dan Dayat Limbon. *Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum*. Yogyakarta : Mitra Kebijakan Tanah Indonesia, 2004.

Salindeho, John. *Masalah Tanah Dalam Pembangunan*. Jakarta : Sinar Grafika, 1988.

Sudjito., *Analisis Yuridis Konversi Tanah Bengkok Menjadi Hak Pakai*, Mimbar Hukum, Yogyakarta, 1994

Urip Santoso, *Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah*, Kencana, Jakarta, 2010.

-----, *Hukum Agraria & Hak – Hak Atas Tanah*, Prenada Media Group, Jakarta, 2010

Yamin Lubis, et.al, *Hukum Pendaftaran Tanah*, Mandar Maju, Bandung, 2008.

Yunasril Ali, *Dasar – Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.

Widjaja, *Otonomi Desa merupakan Otonomi yang Asli, Bulat dan Utuh*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013

Wignjodipuro, Surojo., 1982, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*. Gunung Agung, Jakarta, 1982.

B. Peraturan Perundang-undangan :

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 ini kemudian diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara,

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagai pengganti Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagai pengganti Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1982 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa